



## EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PETA JALAN SDGS DESA DI DESA GERENDONG, KABUPATEN PANDEGLANG

Andri Marfiana<sup>1\*</sup>, Yuniarto Hadiwibowo<sup>2</sup>, Sukarno<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> [andri.marfiana@pknstan.ac.id](mailto:andri.marfiana@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [yuniarto.hadiwibowo@pknstan.ac.id](mailto:yuniarto.hadiwibowo@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> [sukarno@pknstan.ac.id](mailto:sukarno@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

\* untuk penulis korespondensi

### Abstract

*This community service program aimed to assist the Village Government of Gerendong, Pandeglang Regency, in preparing the SDGs Village Roadmap document. The roadmap is a strategic document to support the achievement of the 18 SDGs Village goals, in line with Permendes No. 21/2020. The program involved online and offline mentoring conducted by lecturers and students from PKN STAN. Activities included initial coordination, conceptual education about SDGs, data collection, and joint drafting of the document. The output of the activity was a completed draft of the SDGs Village Roadmap for 2024–2030, which became the basis for village regulations. The program contributed to the village's capacity in sustainable development planning and is expected to be continued with further mentoring for budgeting and monitoring.*

**Keywords:** Community Service, SDGs, Sustainable Development, Village Planning, Village Roadmap

### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi Pemerintah Desa Gerendong, Kabupaten Pandeglang, dalam penyusunan dokumen Peta Jalan SDGs Desa. Dokumen ini merupakan panduan strategis untuk mendukung pencapaian 18 tujuan SDGs Desa sebagaimana diatur dalam Permendes No. 21 Tahun 2020. Pendampingan dilakukan secara daring dan luring oleh dosen dan mahasiswa PKN STAN. Kegiatan mencakup koordinasi awal, edukasi konsep SDGs, pengumpulan data, dan penyusunan bersama draf dokumen. Luaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya draf Peta Jalan SDGs Desa Gerendong Tahun 2024–2030 yang kemudian menjadi dasar penyusunan Perdes. Program ini meningkatkan kapasitas desa dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan diharapkan berlanjut ke tahap pendampingan penganggaran dan monitoring.

**Kata Kunci:** Pembangunan Berkelanjutan, Perencanaan Desa, Pengabdian Masyarakat, Peta Jalan Desa, SDGs

## PENDAHULUAN

Desa merupakan fondasi terluar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menyimpan potensi strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. Data menunjukkan bahwa 91% dari wilayah Indonesia merupakan kawasan perdesaan, dan sekitar 43% penduduk tinggal di wilayah tersebut (Iskandar, 2020). Realitas ini menempatkan desa sebagai simpul penting dalam menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengemuka. Pembangunan yang efektif di desa akan membawa dampak sistemik terhadap kemajuan di tingkat nasional. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas desa dalam menyusun agenda pembangunan yang berorientasi jangka panjang menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Salah satu pendekatan yang kini digunakan secara luas adalah integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) kedalam perencanaan pembangunan desa (C. Allen et al., 2018).

Perubahan pendekatan pembangunan desa secara substantif mulai terlihat sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi ini, desa memperoleh kemandirian dalam merancang pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan warga secara partisipatif. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek utama pembangunan (Iskandar, 2020). Seiring dengan itu, peningkatan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat memberikan peluang nyata bagi desa untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. Namun demikian, kemandirian fiskal tidak serta-merta menjamin kemandirian perencanaan (Azis & Husna, 2021). Masih banyak



desa yang kesulitan dalam menyusun dokumen strategis yang mampu mengarahkan pembangunan secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, penyusunan Peta Jalan SDGs Desa menjadi agenda prioritas yang perlu didampingi secara sistematis (Arham & Kusuma, 2024).

SDGs merupakan hasil kesepakatan global dalam Konferensi PBB tahun 2015 yang melahirkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Panuluh & Fitri, 2016). Pemerintah Indonesia telah mengadopsi agenda tersebut melalui berbagai kebijakan nasional, dan pada tingkat lokal, SDGs dijabarkan ke dalam bentuk SDGs Desa. Model ini memuat 18 tujuan yang dikontekstualisasikan dengan kondisi objektif wilayah perdesaan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan dasar, pelestarian lingkungan, serta penguatan kelembagaan desa (Saguni & Djabbari, 2024). Untuk mencapai tujuan tersebut secara sistematis, dibutuhkan dokumen perencanaan jangka panjang yang disebut Peta Jalan SDGs Desa. Dokumen ini tidak hanya menjadi penunjuk arah pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen pengendali dalam integrasi data dan anggaran berbasis hasil.

Kemendesa (2020) secara eksplisit mengamanatkan bahwa setiap desa perlu menyusun Peta Jalan SDGs sebagai rencana induk pembangunan desa sampai tahun 2030. Di dalamnya harus termuat berbagai komponen penting, seperti identifikasi tujuan, analisis kondisi objektif desa, formulasi permasalahan dan solusi, serta rancangan program prioritas. Dokumen ini diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDDes. Namun demikian, hingga saat ini banyak desa yang belum memahami urgensi maupun tata cara penyusunannya. Permasalahan ini diperkuat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pendampingan teknis dari pihak eksternal (Prabowo, 2013). Oleh karena itu, kehadiran institusi pendidikan tinggi menjadi penting sebagai mitra strategis dalam mendampingi desa menyusun dokumen secara komprehensif dan berbasis data.

Desa Gerendong, yang terletak di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, merupakan salah satu desa yang telah menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan SDGs Desa namun hingga tahun 2024 belum memiliki dokumen Peta Jalan sebagaimana diamanatkan oleh Permendesa PDPT. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan dalam pemahaman teknis, belum optimalnya pengelolaan data, serta belum adanya pendampingan berkelanjutan. Dalam menjawab persoalan ini, Politeknik Keuangan Negara STAN berinisiatif melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan penyusunan Peta Jalan SDGs Desa. Melalui pendekatan yang bersifat partisipatif dan aplikatif, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen strategis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan desa secara berkelanjutan. Program ini sekaligus menjadi bentuk konkret kontribusi akademisi dalam mendukung agenda pembangunan nasional dari level akar rumput.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif, melibatkan dosen dan mahasiswa PKN STAN, serta Pemerintah Desa Gerendong dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Model pelaksanaan yang digunakan adalah kombinasi daring dan luring untuk memastikan efisiensi waktu, aksesibilitas materi, serta efektivitas proses penyusunan. Tahapan kegiatan meliputi edukasi konsep dasar SDGs Desa, pengumpulan data objektif desa, penyusunan draf dokumen, hingga finalisasi dan pelaporan hasil. Luaran utama dari kegiatan ini adalah dokumen Peta Jalan SDGs Desa Gerendong Tahun 2024–2030, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa. Lebih jauh, kegiatan ini membuka peluang dilakukannya integrasi lanjutan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya



menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas desa untuk menjawab tantangan pembangunan jangka panjang.

Penting dicatat bahwa SDGs global terdiri dari 17 tujuan universal yang disepakati pada tingkat internasional, sementara SDGs Desa dikembangkan secara kontekstual dengan menambahkan satu tujuan spesifik, yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, sehingga total menjadi 18 tujuan (Kemendesa, 2020). Adaptasi ini mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya perdesaan Indonesia yang unik, seperti masih tingginya tingkat kemiskinan relatif dan keterbatasan infrastruktur dasar (Arianto, 2024). Tantangan implementasi di tingkat desa meliputi keterbatasan data mikro, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, serta minimnya sinergi antar-pemangku kepentingan (Riyanto, 2025). Oleh karena itu, strategi intervensi harus memperhatikan konteks lokal agar lebih aplikatif dan tepat guna (Prasasti & Ma'ruf, 2025).

Desa Gerendong menghadapi beberapa tantangan spesifik dalam merumuskan dokumen perencanaan berbasis SDGs, seperti minimnya data statistik desa, kurangnya pemahaman aparaturnya mengenai peraturan terkait, serta lemahnya koordinasi internal. Kondisi ini menyebabkan arah pembangunan desa lebih bersifat *ad hoc* daripada berbasis perencanaan jangka panjang yang terukur. Permasalahan ini menjadi relevan untuk diatasi melalui program pendampingan yang dirancang secara partisipatif dan berbasis bukti.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam kurun waktu empat bulan, dimulai sejak bulan September hingga Desember 2024. Tahapan kegiatan dirancang secara sistematis mencakup tiga fase utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan pengajuan proposal kepada pihak terkait dan menjalin koordinasi awal dengan Pemerintah Desa Gerendong. Koordinasi awal dilakukan secara daring melalui platform komunikasi virtual sebagai langkah awal penyamaan persepsi dan pengumpulan data awal terkait kondisi objektif desa. Dalam tahap ini juga dilakukan identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan mitra untuk memastikan bahwa pendampingan yang diberikan tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Pada tahap pelaksanaan, metode yang digunakan adalah pendampingan teknis melalui pendekatan campuran daring dan luring. Sesi daring dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024 sebagai fase pembuka yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada aparaturnya mengenai konsep dasar SDGs Desa, landasan regulatif seperti UU No. 6 Tahun 2014, Perpres No. 111 Tahun 2022, dan Permendesa No. 21 Tahun 2020, serta langkah teknis penyusunan dokumen (Hidayat et al., 2024). Sementara itu, pendampingan luring dilakukan selama dua hari pada tanggal 14 dan 15 November 2024 di lokasi Desa Gerendong. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi secara langsung, diskusi partisipatif untuk menggali potensi dan permasalahan desa, serta penyusunan bersama draf dokumen Peta Jalan SDGs Desa. Seluruh tahapan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan perangkat desa, pendamping lokal desa, dan tim mahasiswa, guna memastikan proses belajar yang transformatif dan bukan sekadar seremonial.

Tahap terakhir yaitu pelaporan, dilaksanakan setelah penyusunan dokumen Peta Jalan SDGs Desa selesai dan disepakati. Draft final kemudian dipresentasikan kepada Pemerintah Desa Gerendong untuk mendapatkan masukan dan validasi sebagai langkah awal integrasi ke dalam regulasi formal desa berupa Peraturan Desa (Perdes). Selain itu, tim pengabdian juga menyusun laporan kegiatan dan dokumentasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik dan administratif. Metode evaluatif yang digunakan dalam tahap ini bersifat formatif, dengan menekankan pada peningkatan kapasitas mitra dan kualitas luaran yang dihasilkan. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan dirancang tidak hanya untuk mencapai target keluaran



berupa dokumen, tetapi juga membangun budaya perencanaan yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil jangka panjang sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk memastikan validitas hasil, tim pengabdian melakukan baseline assessment pada awal kegiatan melalui kuesioner sederhana yang mengukur tingkat pemahaman aparat desa terkait konsep SDGs Desa. Kuesioner ini terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan skala Likert, yang disusun berdasarkan indikator literasi pembangunan berkelanjutan (P. Allen et al., 2018). Instrumen ini telah diujicobakan pada sampel kecil di luar lokasi penelitian untuk memastikan reliabilitas internal. Setelah intervensi, dilakukan evaluasi dengan kuesioner yang sama untuk mengetahui perbedaan skor pemahaman. Hasil pengukuran disajikan secara deskriptif untuk melihat kecenderungan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, dokumentasi partisipasi dan logbook kegiatan disusun untuk mendukung transparansi proses.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dari Politeknik Keuangan Negara STAN di Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, memberikan kontribusi konkret dalam upaya mendorong perencanaan pembangunan desa yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Program ini difokuskan pada pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen Peta Jalan SDGs Desa yang menjadi mandat dari Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Melalui proses yang terstruktur, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen strategis, tetapi juga menciptakan proses pembelajaran kolektif bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam memahami esensi pembangunan berbasis SDGs.

Berdasarkan hasil baseline assessment, rata-rata pemahaman awal aparat desa terhadap SDGs Desa berada pada kategori rendah dengan skor rata-rata 2,1 pada skala 1–5. Partisipasi kegiatan melibatkan 12 orang perangkat desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Peserta sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan SMA/ sederajat, dengan rentang usia 28–55 tahun. Dokumentasi kegiatan mencakup foto kegiatan daring dan luring, daftar hadir peserta, serta rekaman notulensi diskusi. Keterangan detail pada setiap gambar disajikan untuk memberikan konteks terhadap tahapan kegiatan. Logbook harian kegiatan juga dicatat untuk merekam dinamika proses pembelajaran dan interaksi selama program berlangsung.

Tahap perencanaan kegiatan dimulai dengan pengajuan proposal dan komunikasi awal yang dilakukan secara daring seperti terlihat pada Gambar 1. Pertemuan koordinatif antara tim pengabdian dan mitra desa menjadi pintu masuk untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Gerendong. Salah satu temuan utama pada tahap ini adalah belum tersusunnya dokumen perencanaan jangka panjang berbasis SDGs, serta adanya kesenjangan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut secara aplikatif dan kontekstual, bukan sekadar pemenuhan administratif.

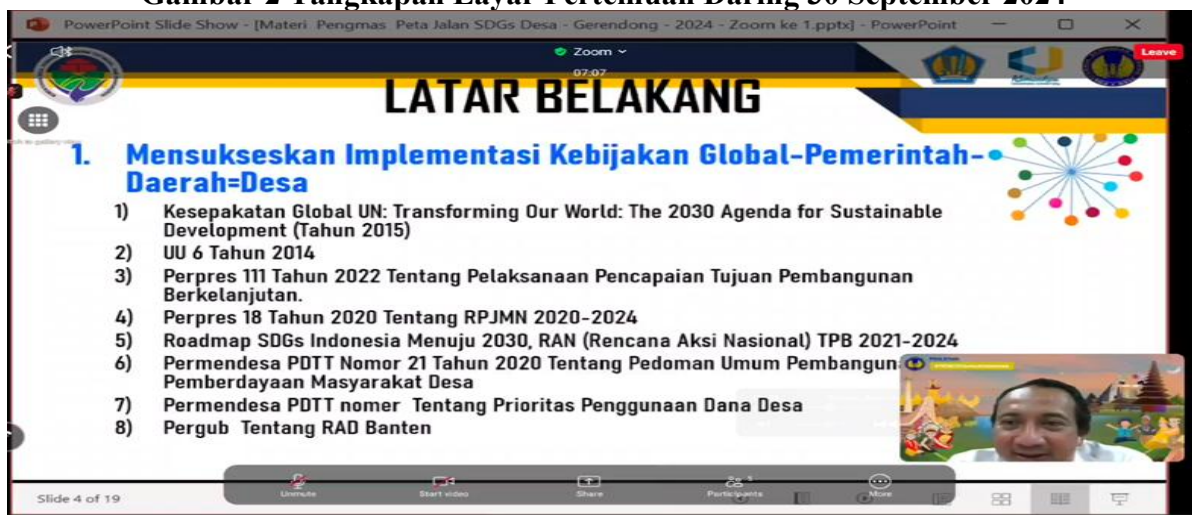


Gambar 1 Koordinasi Awal Melalui Daring



Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pendampingan daring yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024 (Gambar 2). Sesi ini dirancang sebagai fase pengantar untuk menyampaikan konsep dasar SDGs Desa, struktur dokumen Peta Jalan, serta kerangka regulasi yang melandasi kebijakan pembangunan desa. Dalam sesi tersebut, tim pengabdian menyampaikan bahwa dokumen Peta Jalan harus mencerminkan kondisi objektif desa, disusun berdasarkan data riil, serta menyajikan peta permasalahan dan rencana solusi jangka panjang hingga tahun 2030. Hasil dari sesi ini menunjukkan bahwa aparat desa mulai memiliki pemahaman konseptual yang lebih sistematis mengenai peran strategis dokumen tersebut.

Gambar 2 Tangkapan Layar Pertemuan Daring 30 September 2024



Selanjutnya, kegiatan pendampingan luring dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 November 2024. Hari pertama difokuskan pada edukasi mendalam terhadap komponen dokumen Peta Jalan dan diskusi interaktif untuk menggali potensi, permasalahan, dan aspirasi pembangunan dari para pemangku kepentingan desa (Gambar 3). Melalui pendekatan partisipatif, diskusi ini berhasil mengidentifikasi sejumlah isu prioritas, seperti tingginya angka pengangguran muda, keterbatasan akses air bersih, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Proses ini dinilai penting karena membangun rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap dokumen yang sedang disusun.



**Gambar 3 Pendampingan Hari Pertama**



Hari kedua kegiatan ditujukan untuk penyusunan draf dokumen secara bersama-sama (Gambar 4). Dalam proses ini, tim pengabdian berperan sebagai fasilitator teknis, sementara perangkat desa menjadi aktor utama dalam merumuskan sasaran, indikator, dan rencana program. Penyusunan dilakukan secara berlapis, dimulai dari penyusunan latar belakang, kondisi objektif, pemetaan tujuan SDGs yang relevan, hingga penyusunan matriks rencana aksi. Salah satu capaian penting adalah tersusunnya indikator lokal yang realistis dan terukur, sesuai dengan kapasitas sumber daya desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendampingan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif.

**Gambar 4 Pendampingan Hari Kedua**





Evaluasi internal yang dilakukan selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman teknis aparatur desa. Mereka mulai memahami hubungan antara data, kebijakan, dan anggaran dalam satu ekosistem pembangunan yang utuh. Lebih dari itu, kegiatan ini juga membuka ruang dialog yang sehat antara pemerintah desa dan masyarakat, yang selama ini jarang terjadi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mencetak dokumen, tetapi juga memperkuat proses demokratisasi perencanaan di tingkat lokal.

Dari sisi luaran, kegiatan ini berhasil menghasilkan satu dokumen Peta Jalan SDGs Desa Gerendong Tahun 2024–2030 yang telah direview bersama dan siap ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes). Dokumen ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes pada periode berikutnya. Selain itu, luaran tambahan berupa dokumentasi kegiatan, panduan teknis penyusunan, serta publikasi di media sosial desa turut memperluas dampak kegiatan ini secara kelembagaan. Publikasi kegiatan di media sosial resmi Desa Gerendong (Instagram @desagerendong) dilakukan pada tanggal 18 November 2024 untuk memperkuat diseminasi informasi kepada masyarakat luas (Gambar 5). Publikasi ini menampilkan rangkaian foto dokumentasi kegiatan dengan pesan edukatif yang sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas program. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan berbasis data.

**Gambar 5 Publikasi Kegiatan Pendampingan di Media Sosial Instagram Desa Gerendong**



Sumber: <https://www.instagram.com/p/DCgQSI fzgnF/>

Meskipun demikian, proses pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari sejumlah kendala teknis. Di antaranya adalah keterbatasan data individu berbasis SDGs yang belum tersedia secara lengkap di tingkat desa, serta keterbatasan waktu yang membuat proses validasi data harus dilakukan secara bertahap (Sustiawan, 2022). Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui pendekatan kolaboratif dan fleksibilitas metode. Keberhasilan penyusunan dokumen menunjukkan bahwa keberadaan tim pengabdian berfungsi sebagai jembatan penguat kapasitas desa, bukan sebagai pengambil alih proses.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dapat menghasilkan dampak yang nyata, terukur, dan berkelanjutan (Nur Kholik, 2024). Pendekatan pendampingan yang digunakan terbukti efektif dalam membangun kapasitas desa secara bertahap dan berkelanjutan. Hasil yang diperoleh



bukan hanya pada sisi dokumen, tetapi juga pada aspek internalisasi nilai-nilai perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini dapat menjadi model replikasi untuk desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis SDGs.

Selama kegiatan, teridentifikasi beberapa hambatan yang signifikan, seperti keraguan awal perangkat desa dalam menggunakan data numerik untuk pengambilan keputusan, ketidaksamaan pemahaman antar-anggota tim desa, serta keterbatasan waktu untuk mendalami setiap komponen dokumen. Hal ini mengindikasikan perlunya waktu pendampingan yang lebih panjang dan materi teknis yang lebih sederhana namun praktis.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan penyusunan Peta Jalan SDGs Desa di Desa Gerendong telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu tersusunnya dokumen perencanaan strategis pembangunan desa jangka panjang berbasis SDGs. Melalui kombinasi metode daring dan luring, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen sebagai luaran utama, tetapi juga memberikan dampak substantif berupa peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang digunakan memungkinkan munculnya rasa kepemilikan dari pemerintah desa atas dokumen yang dihasilkan. Selain itu, keterlibatan aktif mahasiswa dan dukungan dari pemerintah daerah memperkuat aspek kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci keberhasilan program ini. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan desa dapat menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan implementasi SDGs di tingkat lokal. Hasil kegiatan ini juga membuka peluang bagi replikasi model pendampingan di desa-desa lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola desa yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil. Evaluasi hasil menunjukkan bahwa skor rata-rata pemahaman aparatur desa meningkat dari 2,1 menjadi 3,8 pada skala 1–5 setelah program berlangsung. Indikator keberhasilan yang digunakan mencakup keterlibatan aktif peserta, kemampuan menyusun draft secara mandiri, dan penyerapan materi secara konseptual. Dengan capaian ini, program dianggap berhasil mencapai 85% dari target luaran yang direncanakan.

### **Saran**

Untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas pemanfaatan dokumen Peta Jalan SDGs Desa yang telah disusun, disarankan agar dilakukan pendampingan lanjutan yang fokus pada integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa, seperti RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes. Pemerintah desa juga perlu membentuk tim teknis internal yang bertugas melakukan pengkinian data SDGs secara periodik dan memastikan relevansi program terhadap kebutuhan warga. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah daerah dan pendamping lokal desa sangat penting untuk menjaga kesinambungan implementasi dokumen secara operasional. Institusi pendidikan tinggi diharapkan terus memperluas perannya dalam mendampingi desa melalui pendekatan transformatif yang berbasis keilmuan dan kebutuhan riil lapangan. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan data bagi aparat desa agar mampu mengelola informasi pembangunan secara mandiri dan adaptif. Akhirnya, program infografis, publikasi hasil, dan forum diseminasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Pendekatan ini akan memperkuat posisi desa sebagai aktor utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Diharapkan pada kegiatan berikutnya, indikator keberhasilan atau *Key Performance Indicators* (KPI) yang lebih terukur seperti jumlah draft yang disahkan, waktu penyelesaian,



dan tingkat keberlanjutan implementasi program dapat dirumuskan sejak awal untuk meningkatkan kualitas evaluasi program secara lebih objektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): A review of evidence from countries. *Sustainability science*, 13, 1453-1467.
- Allen, P., Bennett, K., & Heritage, B. (2018). *SPSS statistics: A practical guide with student resource access 12 months*. Cengage Au.
- Arham, M. A., & Kusuma, C. A. (2024). PETA JALAN SDGs: STRATEGI, PRIORITAS, DAN IMPLEMENTASI PRAKTIS UNTUK PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN. *Penerbit Tahta Media*.
- Arianto, T. (2024). *Realitas budaya masyarakat urban*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Azis, R. F., & Husna, N. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018-2020. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 9(03), 241.
- Hidayat, N. K., Sari, D. L., & Pramudita, D. (2024). Prospek Ekonomi Biru untuk Mendukung Capaian Sustainable Development Goal (SDG) 14. *Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif, dan Unggul: Pemikiran 100 Ekonom Indonesia*, 99.
- INDONESIA, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kemendesa, P. (2020). Permendesa PD TT RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jakarta: Departemen Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Nur Kholik, N. K. (2024). Pelaksanaan KKN-Tematik: Mengoptimalkan Diseminasi Pembangunan Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Biefing Paper*, 2(1), 1-25.
- Prabowo, A. (2013). Kebijakan antisipatif pengembangan mekanisasi pertanian. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 27-44.
- Prasasti, P. F., & Ma'ruf, M. F. (2025). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).
- Riyanto, W. H. (2025). *Model Kelembagaan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan*. UMMPress.
- Saguni, D. S., & Djabbari, M. H. (2024). Strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Pelaksanaan Kebijakan SDGs Desa untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 96-127.
- Sustiawan, A. (2022). *efektivitas program sdgs desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa ngabar ponorogo IAIN*].